

Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima

Kamaluddin¹, Muhammad Taufiq², Haeril³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email : kamaluddinmap69@gmail.com¹

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir. Pemilihan daerah pesisir sebagai obyek dari pengentasan kemiskinan adalah karena karakteristik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak masyarakat pesisir yang hidup serba kekurangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjawab berbagai permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan nampaknya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan satu solusi. Begitu juga untuk kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima yang memiliki kehidupan kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Pendekatan secara struktural yaitu lebih ke arah teknis, di mana penyediaan sarana prasarana serta alat produksi yang mendukung dan memperlancar kegiatan produksi masyarakat pesisir. Kemudian pendekatan yang dilakukan secara kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan ketrampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. Selain itu juga perlunya pengembangan kelembagaan dalam bentuk misalnya kelompok nelayan secara permanen sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, informasi, kerjasama dalam berlayar hingga proses produksi. Yang terakhir pendekatan pengentasan kemiskinan disebabkan karena natural yang terkait dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca dapat di atasi dengan memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan, Pengentasan, Kemiskinan, Pesisir

Abstract

This study aims to describe the development policies of the Regional Government of Bima Regency in tackling poverty in coastal communities. The focus of this debris alleviation can be done in the coastal areas of Bima Regency. The selection of coastal areas as objects of poverty alleviation is due to their unique environmental, economic, social and cultural characteristics with abundant natural resources but there are still many coastal communities living in poverty. This study used descriptive qualitative method. The location of this research is at the Department of Tourism, Department of Maritime Affairs and Fisheries, and the Office of the Environment, Social Service of Bima Regency, these locations are very strategic in viewing case studies and problems that occur. The research subjects were selected through purposive sampling. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. The results of the research show that in answering various problems in poverty alleviation it seems that one solution approach cannot be used alone. Likewise for the poverty of coastal communities in Bima Regency who have complex lives both structurally, culturally and naturally. The structural approach is more technical, in which the provision of infrastructure and production tools supports and facilitates the production activities of coastal communities. Then the approach is taken culturally, namely providing knowledge, information and skills to coastal communities so that their insights are open so that they can improve their self-quality and be more empowered. In addition, there is also the need for institutional development in the form of permanent fishermen groups as a means to share experiences, information, cooperation in shipping to the production process. Finally, the poverty alleviation approach due to natural causes related to climate and weather disturbances can be overcome by providing alternative jobs that can be carried out during unreliable seasons for sailing.

Keywords: *Policy, Development, Alleviation, Poverty, Coastal*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini menjadi beban dan tugas pemerintah beserta stakeholder terkait, karena menyangkut harkat hidup orang banyak (Purwanto, et.al., 2013). Tidak mudah memang untuk mengatasi kemiskinan benar-benar hilang dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan aspek kemiskinan sangat luas dan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor didalamnya (Liwiya, et., al, 2018).

Pada dasarnya kemiskinan diartikan sebagai hidup pada atau di bawah garis kemiskinan, yang biasanya didefinisikan dengan kriteria WHO: ketika seseorang terlalu miskin untuk mendapatkan “makanan cukup kalori”. Namun faktanya kemiskinan yang terjadi bisa lebih parah dari kekurangan makanan yang cukup akan kalori. Namun berdasarkan definisinya kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok orang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum (disebut sebagai garis kemiskinan) yang layak berlaku di masyarakat (Handono, et.al, 2020).

Lebih lanjut mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut ini berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Seseorang disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic need*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Ari, 2019).

Kemudian berdasarkan penyebabnya kemiskinan dibedakan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural ataupun kemiskinan kultural (Sukesi & Rosalinda, 2017). Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan karena sumber daya yang tidak memadai baik secara SDA ataupun SDM. Akibatnyadengan kemampuan SDM yang rendah, masyarakat tidak dapat mengeksplorasi SDA untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lagi pula ketersediaan SDA juga tidak mendukung untuk dapat dikembangkan dengan tujuan pemenuhan

kebutuhan. Kemiskinan struktural disebabkan karena pengaturan kelembagaan atau status sosial dalam masyarakat yang membuat seseorang terbelenggu dan tidak memiliki kesempatan karena lemahnya akses pada kekuasaan. Penyebab kemiskinan terakhir yaitu disebabkan budaya, yang disebut dengan kemiskinan kultural. Kemiskinan ini terjadi karena gaya hidup, kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat (Indarwati, & Sarjiyanto, 2022).

Demikian di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar apabila dapat dikembangkan secara optimal. Namun apa daya masyarakat pesisir Kabupaten Bima seringkali disebut sebagai masyarakat yang termarginalkan. Karena termarginal maka penghidupan masyarakat pesisir Kabupaten Bima perlu mendapat perhatian layaknya kemiskinan yang terjadi di desa dan kota.

Masyarakat pesisir memiliki kegiatan sosial ekonomi menarik yang berbeda dari masyarakat desa dan kota. Setiap harinya masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya mencari sumber daya laut berupa beraneka jenis ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang, rumput laut, terumbu karang, mutiara, , garam dll. Sumber daya laut yang melimpah membuat masyarakat Pesisir enggan untuk berpindah ke kota. Mereka lebih suka tinggal bersama keluarga dan mencari penghasilan di tempat mereka tinggal. Namun ternyata jauh dari benak kita masih banyak masyarakat pesisir yang tergolong miskin.

Lebih lanjut kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima terjadi dengan berbagai kemungkinan seperti kurangnya akses yang diakibatkan dari topografi wilayah, transportasi, infrastruktur, kurang terbukanya informasi dan teknologi untuk melakukan pergerakan mengubah nasib mencari kehidupan yang lebih sejahtera (Widiastuti, 2014).

Selain itu, kemiskinan dan tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga masyarakat pesisir Kabupaten Bima berakar dari faktor-faktor kompleks yang terkait, antara lain pekerjaan utama sebagai nelayan tradisional, tidak memiliki faktor produksi kecuali tenaga kerja, buruh bangunan, dan pekerjaan serabutan.

Demikian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada pasal 63 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi, dan informasi.

Berdasarkan informasi tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir Kabupaten Bima. Fokus pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan di daerah pesisir pantai Kabupaten Bima. Pemilihan daerah pesisir sebagai obyek dari pengentasan kemiskinan adalah karakteristik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak masyarakat pesisir yang hidup serba kekurangan. Padahal begitu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan. Hal ini yang perlu ditelusuri penyebab kemiskinan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bima. Penyebab kemiskinan yang terjadi akan dilihat berdasarkan kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Oleh karena itu dengan mengetahui ketiga penyebab kemiskinan tersebut membantu pembuat kebijakan dalam memetakan rumusan solusi dalam penyelesaian pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Retnowati, 2011).

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya (Suleman, et.al.,2019).

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Secara

ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Rizki, 2020).

Seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Correia, 2021).

Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya (Silooy, 2017).

Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin (Andria, et.al, 2014).

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang

paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Widiastuti, 2014).

Kemiskinan Situasional atau kemiskinan Natural

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin (Zuber, 2011).

Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain (Nur Fauzan, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial Kelompok Masyarakat Pengawas di Pesisir, Kelompok Tani Pugar, Komunitas Pesisir, dan Komunitas Ekonomi Kreatif (Ekraf). Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bima sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. Disebut miskin karena masih banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut namun modal usaha yang dimiliki relatif kecil, peralatan tangkap tradisional, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bima hanya mendapatkan hasil ikan yang sangat minim. Belum lagi pekerjaan mereka sangat tergantung dengan alam. Tidak sewaktu-waktu nelayan dapat mencari ikan di laut dengan seenaknya namun mereka mengacu pada musim dan iklim. Pada saat musim barat nelayan dapat mencari ikan di laut karena cuaca yang mendukung namun pada saat musim timur (paceklik) nelayan tidak bisa menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Ketidakpastian musim dan iklim ini yang menjadi kendala masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencaharian sebagai nelayan.

Kemudian kehidupan masyarakat pesisir dari struktur sosial budaya yang tercermin dalam operasional memiliki kontribusi besar dalam membentuk corak pelapisan sosial ekonomi secara umum dalam kehidupan masyarakat nelayan. Mereka yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses; lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu; lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh.

Mereka yang menempati lapisan atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar warga masyarakat nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perikanan, akses modal, dan akses pasar hanya menjadi sebagian kecil masyarakat yaitu mereka yang berada pada lapisan atas. Oleh karena itu perbedaan lapisan struktur sosial berdampak pada pembagian hasil yang terjadi dikalangan nelayan.

Sistem pembagian hasil atau pemasaran hasil tangkapan, yang menempatkan para pemilik perahu atau pedagang perantara/pedagang ikan memperoleh bagian atau keuntungan besar dari kegiatan tersebut, dianggap sebagai kewajaran. Pembagian tersebut dianggap sesuai dengan kontribusi, biaya, resiko ekonomi yang harus ditanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan. Persepsi demikian terbentuk karena faktor keterpaksaan atau karena tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan nelayan. Struktur sosial budaya yang demikian yang mengakibatkan nelayan miskin. Penyebab kemiskinan tersebut dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Seperti yang telah digambarkan kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima, tidak hanya kemiskinan yang dialami karena dampak struktural dan natural namun juga kultur masyarakat pesisir menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Masyarakat pesisir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima masih sangat kental dengan kepercayaan kepada alam dan lingkungannya. Mereka melakukan upacara laut sebagai wujud doa kepada Sang Pencipta agar selalu dilindungi dan diberi keselamatan dalam melakukan pekerjaannya sebagai nelayan.

Selain itu doa ini juga merupakan salah satu ungkapan syukur yang telah diberikan rejeki melalui perantara laut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengeluaran untuk penyelenggaraan upacara kadang tidak terhitung jumlahnya sehingga mengakibatkan pendapatan yang diterima tidak seimbang dengan pengeluaran dan sering terjadi kasus hutang bahkan penjualan aset produksi.

Kemudian kemiskinan kultural dapat disebabkan karena gaya hidup budaya setempat yang tidak rasional. Gaya hidup yang dimaksud terkait dengan pandangan masyarakat akan kedudukan kita sebagai warga (status sosial). Sesuai dengan teori motivasi maslow bahwa selain dorongan untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial dan kasih sayang, juga terkait dengan harga diri dan aktualisasi diri. Ketika masyarakat pesisir dapat merayakan upacara adat secara mewah maka mereka akan dipandang dan memiliki status di lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini terkait dengan *self esteem*/harga diri. Analisa identifikasi permasalahan ini perlu melihat secara holistik yang melibatkan beberapa aspek secara terintegrasi seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, birokrasi yang nantinya menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan agar ketepatan dalam mengatasi kemiskinan dapat dicapai dengan mengurangi angka kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

Adaptasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat

Masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru bagi kita dan berbagai program pengentasan kemiskinan telah dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih besar. Entah program yang tidak tepat untuk mengatasi pengentasan kemiskinan ataukah memang masyarakat yang masih kurang berdaya. Program-program dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sudah begitu banyak mulai dari BLT, RASKIN, PKH, JAMKESNAS, BOS, KUR (Kredit Usaha Rakyat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan Pemberdayaan Kelompok Petani Garam dan Perikanan.

Program pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan secara keseluruhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah keefektifitasan program dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan masih kurang efektif. Kritik terhadap program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah rata-rata sifatnya membuat masyarakat menjadi pasif tidak kreatif. Hal ini yang perlu dirubah dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam arti masyarakat sebagai subyek pelaksana program pengentasan kemiskinan. Komposisi yang tepat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan selain melibatkan pemerintah, dan masyarakat setempat perlu adanya keterlibatan instansi terkait. Hal ini yang perlu diimplementasikan terhadap program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

Berikut adalah hasil identifikasi penulis terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bima berdasarkan analisis SWOT:

Tabel 1. Identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bima

Indikator	Analisis SWOT
<i>Strength (S)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat pesisir memiliki sumber daya laut yang melimpah misalnya: berbagai macam ikan, kerang, cumi-cumi, udang, rumput laut dan garam. Berbatasan dengan darat sehingga bisa mendapatkan alternatif pekerjaan yang lainnya. Transportasi mendukung dekat dengan jalur darat.
<i>Weakness (W)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Hanya mengandalkan dari sumber laut saja. Kurangnya fasilitas untuk menangkap ikan, masih menggunakan kapal tradisional (perlu motorisasi). Harga bensin mahal. Upacara adat yang menelan biaya tinggi. Masih adanya struktur sosial ekonomi di masyarakat yang merugikan nelayan kecil. Sumber daya manusia kurang berdaya.
<i>Opportunities (O)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah pesisir merupakan salah satu obyek alam yang indah yang dapat digunakan sebagai sumber masukan daerah dengan membuka obyek wisata. Membuka tempat makan <i>sea food</i> sebagai usaha yang dapat dikelola per rumah tangga. Pembuatan kerajinan dengan menggunakan kerang dan pasir sebagai hasta karya olahan <i>handmade</i> khas daerah tersebut. Membuat makanan ringan dari hasil laut, misalnya: ikan kering, sambal ikan kering dll, Penghasil garam.
<i>Treat (T)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ikan semakin langka sehingga perlu jauh berlayar untuk mendapatkan ikan. Terjadi kerusakan alam. Cuaca dan iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan nelayan tidak bisa selalu mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Sumber; Data primer, 2021

Strategi pengentasan kemiskinan pada dasarnya dapat diatasi dengan melibatkan peran pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Dengan kata lain, strategi ini menggabungkan antara perencanaan secara *top-down* dan *bottom-up*.

Fungsi dari strategi ini adalah saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan alasan tidak semua upaya dapat dilakukan secara mandiri seluruhnya oleh masyarakat tetap masih diperlukannya pihak luar sebagai pendukung program. Yang perlu dititikberatkan dalam strategi pengentasan kemiskinan ini masyarakat dapat mandiri dan berdaya setelah terlepas dari bantuan dari pemerintah ataupun instansi yang terlibat.

Masyarakat dapat secara kreatif dan aktif mengembangkan program yang diberikan oleh pemerintah agar individu dalam masyarakat mempunyai *value added* yang dapat digunakan bertahan dan meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam proses berlangsungnya pengentasan kemiskinan perlu adanya suatu monitoring dan evaluasi agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga program pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

Menjawab masalah kemiskinan tidak bisa dengan satu kebijakan (*single policy*) dapat mengatasi semua kasus kemiskinan. Perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung yang sangat paham mengenai apa yang terjadi di lingkungannya. Keterlibatan masyarakat difokuskan sebagai subjek pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan dengan tujuan secara mandiri mampu mengembangkan potensi dan kemampuan diri.

Identifikasi masalah digolongkan berdasarkan struktural, kultural dan natural. Masing-masing identifikasi masalah akan dikaitkan langsung pada strategi pengentasan kemiskinan apakah bersifat *top-down* atukah *bottom-up* disesuaikan dengan realitas yang ada. Apabila jenis masalah sudah teridentifikasi dan diketahui strategi pengentasannya maka dibuat aplikasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat untuk menjawab persoalan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

SIMPULAN

Menjawab berbagai permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan nampaknya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan satu solusi. Begitu juga untuk kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Bima yang memiliki kehidupan kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Keadaan seperti ini yang menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk dapat mengupayakan pendekatan program yang mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat pesisir. Pendekatan secara struktural yaitu lebih ke arah teknis, di mana penyediaan sarana prasarana serta alat produksi yang mendukung dan memperlancar kegiatan produksi masyarakat pesisir. Kemudian pendekatan yang dilakukan secara kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan ketrampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya (*open minded*) sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. Selain itu juga perlunya pengembangan kelembagaan dalam bentuk misalnya kelompok nelayan secara permanen sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, informasi, kerjasama dalam berlayar hingga proses produksi dan juga untuk mengatur perencanaan upacara adat dan kegiatan budaya lainnya. Yang terakhir pendekatan pengentasan kemiskinan disebabkan karena natural yang terkait dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca dapat di atasi dengan memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar. Perlu diketahui ketiga pendekatan yang dilakukan dilihat berdasarkan penyebab kemiskinan pada kasus masyarakat pesisir di Kabupaten Bima dibingkai di dalam sebuah strategi yang melibatkan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat setempat sehingga diharapkan selain masyarakat dapat berdaya namun juga program yang dijalankan tetap bisa terus berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, S., & Abubakar Hamzah, M. N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Relatif Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(4).
- Ari, A. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Correia, M. M. (2021). *Menelaah Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Terang Teori Keadilan John Rawls* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Handono, S. Y., Hidayat, K., & Purnomo, M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Universitas Brawijaya Press.
- Indarwati, I., KS, A., MP, P. D., & Sarjiyanto, S. E. (2022). *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Lakeisha.
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bima, Jawa Tengah). *Agriekonomika*, 2(1), 13-26.
- Liwiya, Y., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Mariana, K. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding*.
- Nur Fauzan, A. (2013). Potret Kemiskinan Di Karangsoa Dalam Bekisar Merah: Analisis Strukturalisme Genetik.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Rizki, D. P. (2020). *Potret Kemiskinan Struktural Masyarakat Di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 79-84.

- Sukezi, K., & Rosalinda, H. (2017). *Migrasi perempuan, remitansi, dan perubahan sosial ekonomi pedesaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Suleman, A., Pratikno, M. H., & Sandiah, N. (2019). Kemiskinan Struktural dan Hubungan Patron Klien Nelayan di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Widiastuti, T. (2014). Kemiskinan struktural informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 314-329.
- Yasin, R. (2021). *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Zuber, A. (2011). Kemiskinan masyarakat pedesaan: studi kasus di Desa Sanggang, Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi Dilema Dialektika Masyarakat*, 27(2), 95-110.